



LKJIP 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

ABSTRAK

Melaporkan Pencapaian Kinerja (Performance Result) selama tahun 2022 yang dibanding dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) tahun 2022 yang mengacu pada Rencana Strategis (Strategic Plan) PN Ketapang Tahun 2020-2024.

PENERBIT

PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II**

2023

Bismillahirrahmanirahim

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanallahi Wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan taufiq-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Ketapang Tahun 2022 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Substansi dari penyusunan LKjIP Tahun 2022 PN Ketapang, dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja dan laporan pelaksanaan program kerja Pengadilan Negeri Ketapang Tahun 2022, yang meliputi teknis yudisial, administrasi peradilan, dan administrasi umum serta sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan PN Ketapang dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai rencana kinerja.

Dengan diterbitkannya LKjIP Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan manfaat kepada masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat, relevan dan transparan mengenai kinerja PN Ketapang.

Akhir kata, kami berharap agar LKjIP Tahun 2022 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk menilai kinerja bagi aparatur PN Ketapang.

Salam 5 AS

Kerja Ikhlas, Kerja Cerdas, Kerja Keras, Kerja Tuntas, dan Kerja Berkualitas tanpa Miras

Ketapang, 13 Januari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Ketapang



EGA SHAKTIANA, S.H., M.H.
NIP. 19771001 200312 1 00 1

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Ketapang (PN Ketapang) tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam memberikan laporan akuntabilitas kinerja PN Ketapang selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKjIP bertujuan untuk melaporkan Pencapaian Kinerja (*Performance Result*) selama tahun 2022 yang dikomparasi dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2022 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (*Strategic Plan*) PN Ketapang Tahun 2020 - 2024.

PN Ketapang menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang secara umum dapat diinformasikan bahwa pencapaian hasil kinerja program kerja selama kurun waktu tahun 2022 telah berusaha memenuhi/mencapai 4 (empat) sasaran strategis yang pengukurannya dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi dan pencapaian target.

Salah satu tugas pokok dan fungsi PN Ketapang adalah penyelesaian perkara baik secara administrasi maupun produk hukum yang dihasilkan, dimana hal tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan kinerja PN Ketapang dalam tahun 2022.

Keberhasilan pencapaian kinerja tergantung pada beberapa hal seperti; sumber daya manusia yang handal, sarana dan prasarana yang memadai dan lain sebagainya. Oleh karena PN Ketapang selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja, kinerja dan pelayanan disemua aspek tidak hanya untuk meningkatkan kinerja instansi sebagai salah satu indikator keberhasilan suatu instansi pemerintah namun yang tidak kalah pentingnya adalah dalam rangka memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Berikut gambaran umum sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi dan capaian kinerja PN Ketapang dalam kurun waktu tahun 2022.

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	100,61	105,91

Akuntabel	b.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	100,49	105,78
	c.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85	88,8	104,47
	d.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85	92,16	108,42
	e.	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	0	0
	f.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	92,91	116,14
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
	b.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
	c.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	1	1,72	172
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	30	50	166,67
5. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	85	98,29	115,76
	b.	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100
	c.	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)	ii
DAFTAR ISI	iv
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Sistematika Penyajian	9
II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	10
1. Visi dan Misi	10
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	11
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	12
B. Indikator Kinerja Tahun (IKU)	13
C. Rencana Kinerja Tahun 2022	15
D. Perjanjian Kinerja (dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2022	16
III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	19
B. Analisa Akuntabilitas Kinerja	24
C. Realisasi Anggaran	36
IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	38
B. Saran-saran	38

LAMPIRAN

SK TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketika reformasi bergolak di Indonesia, segenap komponen bangsa terpacu untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kelola dan upaya-upaya lainnya ke arah yang lebih baik. Semangat itu pulalah yang mendorong Pemerintah untuk mendayagunakan aparatur negara guna mewujudkan masyarakat madani yang dicita-citakan. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa aparatur negara yang ideal merupakan keniscayaan hakiki bagi keberlangsungan pembangunan nasional.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi yang mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan Kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga sebagai puncak manajemen di bidang administrasi, personil dan finansial serta sarana prasarana.

Kebijakan "satu atap", memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung Republik Indonesia dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel dalam kerangka pembaharuan peradilan yang "komprehensif dan sistematis" demi tercapainya cita-cita pembaharuan badan peradilan secara utuh.

Dalam rangka penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan dibawahnya terkait penguatan area akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Peraturan kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Pengadilan Negeri Ketapang (PN Ketapang) yang merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Pontianak dalam naungan

Direktorat Peradilan Umum dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi, serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Untuk itu Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI telah menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah *juncto* Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah *juncto* surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang kami susun memiliki dua fungsi utama. *Pertama*, berfungsi sebagai laporan akuntabilitas kinerja yang merupakan sarana bagi Pengadilan Negeri Ketapang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak. *Kedua*, berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Ketapang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dua fungsi utama LKjIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP oleh Pengadilan Negeri Ketapang.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa/meyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*".¹ Di dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 juga dikemukakan "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*".²

1. Kedudukan

Pengadilan Negeri Ketapang (PN Ketapang) adalah suatu Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Pontianak dalam naungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dilingkungan Mahkamah Agung RI yang merupakan *salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya* ³ dengan wilayah hukum mencakup Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat.

2. Tugas Pokok

Pengadilan Negeri Ketapang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan Pasal 50 Bab III Kekuasaan Pengadilan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Ketapang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Ketapang memiliki fungsi sebagai:

¹ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³ Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 2 Tahun 1986

- a. Melaksanakan penerapan/penegakan hukum yang mandiri dan berkualitas pada tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat;
- b. Memberikan pelayanan dan bantuan tentang hukum bagi masyarakat atau pencari keadilan di wilayah hukum yang mencakup Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat;
- c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di wilayah hukum yang mencakup Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat;
- d. Memberikan data dan informasi administrasi perkara, personil, finansial dan sarana prasarana baik kepada instutusi internal maupun eksternal dalam hal ini baik kepada masyarakat umum/perorangan, institusi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dalam dunia pendidikan maupun pihak asing. Dalam hal ini setelah data dan informasi tersebut diseleksi mengacu pada Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

C. Struktur Organisasi

Mulai tahun 2016 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pontianak mengacu pada Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undnag Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana dirubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2017 terdiri atas:

1. **Ketua** sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Makamah Agung. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan, daftar, catatan, risalah, beritaacara, serta berkas perkara. Menetapkan Panjar biaya perkara, (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk ber-acara secara prodeo atau tanpa

membayar biaya perkara). Melaksanakan persidangan perkara perdata, pidana, Phi, perikanan maupun Tipikor.

2. **Wakil Ketua** adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya dan Melakukan Pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.
3. **Hakim** adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya.
4. **Panitera** bertugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara, pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, mutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan, pelaksanaan mediasi, pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri;
5. **Panitera Muda Perdata** bertugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata, pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding,

kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan penerimaan konsinyasi, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

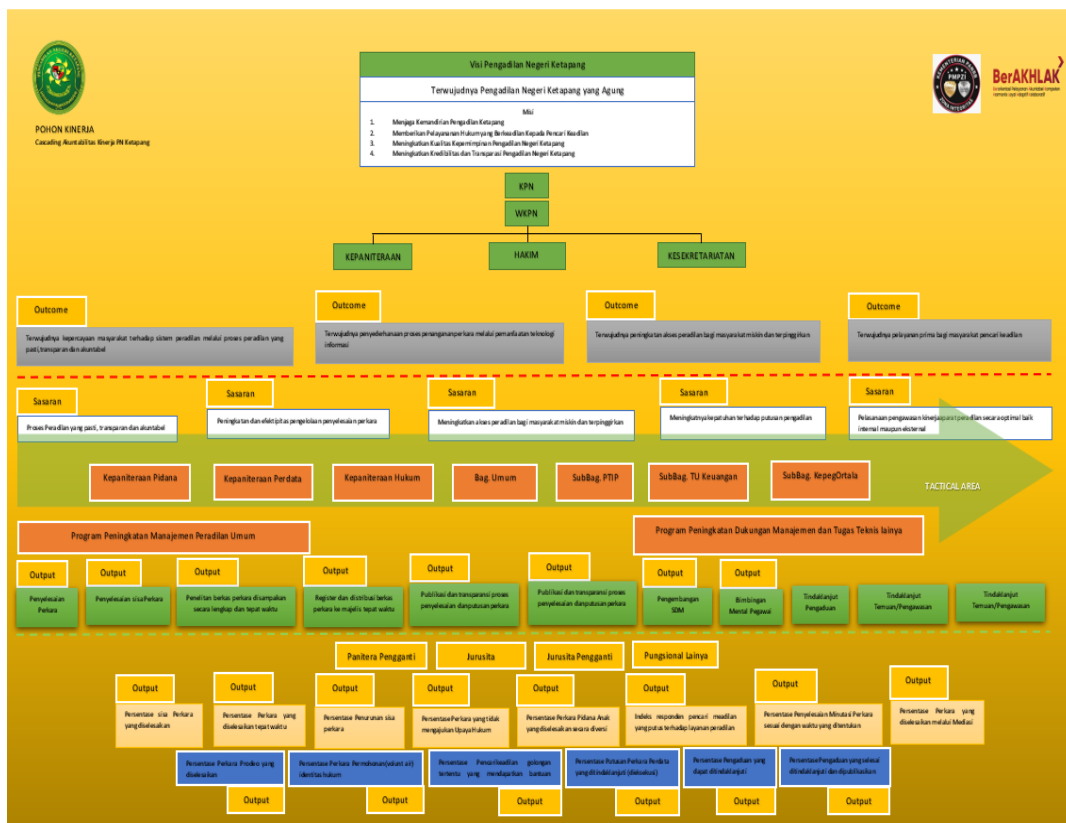
6. **Panitera Muda Pidana** bertugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana, pelaksanaan registrasi perkara pidana, pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
7. **Panitera Muda Khusus** bertugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus, pelaksanaan

registrasi perkara khusus, pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan, pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik, pelaksanaan penyiapan penunjukkan hakim pengawas dalam perkara kepailitan, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

8. **Panitera Muda Hukum** bertugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara, pelaksanaan penyajian statistik perkara, pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara, pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara, pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara, pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara, pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;
9. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam membuat berita acara persidangan. Dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bila telah selesai diminutasi.
10. **Sekretaris** adalah bertugas menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan

pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan urusan keuangan, penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic, pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Ketapang;

11. **Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan;
12. **Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
13. **Kasubag Umum dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.



D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Ketapang selama Tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja (*performance agreement*), maka penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi pada Tahun 2022. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Untuk mewujudkan hal yang dimaksud, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Ketapang disusun sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, menjelaskan secara singkat latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.
- AB II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas rencana strategis Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2020 – 2024 dan Penetapan Kinerja 2021
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis arah kebijakan dan strategi, pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pontianak dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2021. Dan uraian realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.
- BAB IV : Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Reviu Rencana Strategis (Renstra) PN Ketapang 2020-2024 mengacu kepada Cetak Biru Pembaharuan Pengadilan 2010-2035 Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dan Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI 2020-2024 yang pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan peraturan perundang-undangan kelembagaan peradilan termasuk pembinaan sikap dan perilaku aparatur peradilan serta pengawasan dan pengendalian manajemen agar tercapai efektifitas, efesiensi dan produktifitas dalam mewujudkan dan mencapai cita-cita menjadi "Badan Peradilan yang Agung".

Renstra PN Ketapang 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah PN Ketapang yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh PN Ketapang berserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Secara ringkas substansi Renstra PN Ketapang dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Mengacu kepada Visi MA yang telah dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2009, Visi Pengadilan Negeri Ketapang adalah:

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KETAPANG YANG AGUNG"

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, PN Ketapang menetapkan misi yang akan dilakukan secara konsisten, yaitu:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Ketapang.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Ketapang.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Ketapang.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi PN Ketapang, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. PN Ketapang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan PN Ketapang untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah tercapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Sasaran-sasaran strategis PN Ketapang yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh PN Ketapang dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan yang akan diwujudkan pada tahun 2022 tersebut selanjutnya dirinci pada pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran tahunan dari PN Ketapang ini menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, serta perubahan perbaikan kondisi aparatur negara yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Hasil rewiu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Ketapang mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Ketapang pada tahun 2020-2024, sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; Indikator untuk pengukur capaian sasaran ini adalah :
 - a. Persentase sisa Perkara Perdata, Perdata Khusus, Pidana, dan Pidana Khusus yang diselesaikan;
 - b. Persentase Perkara Perkara Perdata, Perdata Khusus, Pidana, dan Pidana Khusus yang

- yang diselesaikan tepat waktu;
 - c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Huku Banding, Kasasi dan PK;
 - d. Persentase Perkara Pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi;
 - e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; Indikator untuk pengukur capaian sasaran ini adalah :
 - a. Persentase Salinan Putusan Perdata dan Pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
 - b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi;
 - c. Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu;
 - d. Persentase putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus
 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan; Indikator untuk pengukur capaian sasaran ini adalah :
 - a. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan;
 - b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan;
 - c. Persentase Pecari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)
 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Indikator untuk pengukur capaian sasaran ini adalah :

 - a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Ketapang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Layanan Dukungan Manajemen Internal

- b. Layanan Perkantoran : Pembayaran Gaji dan Tunjangan, dan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Ketapang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Negeri Ketapang telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : W17-U4 / 1256 / OT.01.3 / 12 / 2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dilingkungan Pengadilan Negeri Ketapang. Dimana Reviu IKU ini disusun oleh Tim Reviu IKU Pengadilan Negeri Ketapang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : W17-U4 / 1255 / OT.00 / 12 / 2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Penetapan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dilingkungan Pengadilan Negeri Ketapang.

Reviu Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
	b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
	c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
	d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
	e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
	f. Index Kepuasan Pencari Keadilan
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu
	b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu
	c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
5. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
	b. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

	c. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan
--	---

C. Rencana Kinerja Tahun 2022

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Didalam rencana kinerja juga ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Reviu Renstra 2020-2024 PN Ketapang, ditetapkanlah Rencana Kinerja (*performance plan*) Tahun 2022 (RKT) yang merupakan hasil dari proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024 PN Ketapang.

Penjabaran sasaran strategis, indikator kinerja dan target tahun 2022 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
	b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95
	c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85
	d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85
	e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5
	f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	80
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100

	b.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
	c.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	1
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	30
5. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	85
	b.	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
	c.	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2021. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2021 tidak terlepas dari “Cetak Biru dan Renstra Mahkamah Agung 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan. Dokumen Perjanjian Kinerja PN Ketapang Tahun 2022 telah mengacu pada Reviu Renstra PN Ketapang 2020-2024. Oleh karena itu Indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama PN Ketapang yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra PN Ketapang 2020-2025.

Perjanjian Kinerja PN Ketapang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
	b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95
	c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85
	d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85
	e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5
	f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	80
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
	b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100

	c.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	1
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	30
5. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	d.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	85
	e.	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
	f.	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100

Dengan Anggaran Pengadilan Negeri Ketapang Tahun 2022, sebagai berikut :

KEGIATAN		ANGGARAN
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 4.756.684.000,00
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 119.000.000,00
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 100.800.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Pengukuran tingkat capaian kinerja PN Ketapang dilakukan dengan melakukan perbandingan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja PN Ketapang dengan realisasinya, atau dengan kata lain membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tingkat capaian kinerja PN Ketapang tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	100,61	105,91
	b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	100,49	105,78
	c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan	85	88,8	104,47

		Upaya Hukum Banding			
	d.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85	92,16	108,42
	e.	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	0	0
	f.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	92,91	116,14
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
	b.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
	c.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	1	1,72	172
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	30	50	166,67
5. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan	a.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	85	98,29	115,76

Penyelesaian Perkara	b. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100
	c. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Ketapang Tahun 2022 merupakan pencapaian atas target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Perbandingan capaian kinerja sebagaimana tabel diatas, dapat dilihat lebih rinci sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2020	2021	2022
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	50,11	146,37	
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	93,70	93,98	
	c. Persentase penurunan sisa perkara	55,20	46,38	
	d. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu			105,91
	e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu			105,78
	f. Persentase Perkara yang	126,37	95,6	104,47

		Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			
	g.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	136,78	102,18	108,42
	h.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	147,47	115,34	115,76
	f.	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0	0	0
	g.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	Baik	Baik	116,14
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	100	100
	b.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	78,87	105,26	100
	c.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu			100
	d.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	0	172
	e.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online	-	-	-

		dalam waktu 1 hari setelah diputus			
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-
	b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	-
	c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	111,1	148,13	166,67
5. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali			115,76
	b.	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu			100
	c.	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan			100

Dari hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, berikut capaian kinerja Pengadilan Negeri Ketapang selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2022.

Capaian Kinerja PN Ketapang	Capaian Tahun (%)		
	2020	2021	2022
<u>Rata-rata capaian pengukuran kinerja organisasi</u>	99,96	95,06	106,79

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Ketapang pada tahun 2022 adalah sebesar **99,17%, meningkat 11,73%** dari pencapaian tahun 2021.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020

1. Sasaran Strategis 1 : *Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel*

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	100,61	105,91
b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	100,49	105,78
c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85	88,8	104,47
d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85	92,16	108,42
e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	85	98,4	115,76
f. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	-	-
g. Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	92,91	116,14
Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel		108,14	

Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Ketapang terus berupaya mencapai target dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang efektif dan efisiensi, dan terbukti pada capaian sasaran Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Tahun ini dengan nilai **108,14%**

a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Export Excel

REKAPITULASI PERKARA GUGATAN
PENGADILAN NEGERI KETAPANG
Januari - Desember 2022

NO	BULAN	SISA BULAN LALU			MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS BULAN INI	BELUM PEMBAGIAN MAJELIS	MEDIASI BERHASIL	MEDIASI GAGAL	GUGUR	CABUT	JUMLAH PUTUS	JUMLAH MEDIASI BERHASIL	MINUTASI BULAN INI	BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA
		BELUM PUTUS	SUDAH PUTUS BELUM MINUTASI	MEDIASI BERHASIL BELUM MINUTASI													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Januari	11	1	0	10	22	6	1	0	2	0	0	7	0	6	1	16
2	Februari	15	1	0	6	22	5	1	0	0	0	1	6	0	2	4	19
3	Maret	16	4	0	2	22	8	0	0	1	0	0	12	0	12	0	10
4	April	10	0	0	8	18	6	0	0	2	0	0	6	0	5	1	13
5	Mei	12	1	0	33	46	1	6	0	1	0	0	2	0	1	1	45
6	Juni	44	1	0	7	52	40	6	0	1	0	0	41	0	38	3	14
7	Juli	11	3	0	6	20	8	6	0	2	0	0	11	0	11	0	9
8	Agustus	9	0	0	22	31	17	6	0	1	0	0	17	0	17	0	14
9	September	14	0	0	24	38	20	6	0	6	0	1	20	0	11	9	26
10	Oktober	18	9	0	14	41	6	9	0	1	0	0	15	0	15	0	26
11	November	26	0	0	23	49	31	9	0	3	0	0	31	0	15	16	34
12	Desember	18	16	0	6	40	15	9	0	0	0	0	31	0	31	0	9
TOTAL					161		163		0	20	0	2			164		

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100 = 100,61\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 terealisasi sebesar 100,61% dan mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 95% dengan persentase capaian sebesar **105,91%**.

b. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Export Excel

REKAPITULASI PERKARA PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI KETAPANG
Januari - Desember 2022

NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI	MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS	BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MINUTASI BULAN INI	PUTUS BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA	JUMLAH TERDAKWA	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	89	91	180	71	3	78	68	10	112	441	314
2	Februari	112	102	214	102	1	112	85	27	129	543	344
3	Maret	129	79	208	83	1	110	94	16	114	468	358
4	April	114	122	236	98	1	114	108	6	128	498	349
5	Mei	128	58	186	75	0	81	49	32	137	366	282
6	Juni	137	77	214	65	1	97	83	14	131	408	338
7	Juli	131	76	207	103	2	117	110	7	97	449	315
8	Agustus	97	146	243	146	3	153	139	14	104	589	354
9	September	104	93	197	107	3	121	115	6	82	459	293
10	Oktober	82	52	134	69	6	75	73	2	61	290	197
11	November	61	63	124	33	1	35	31	4	93	293	216
12	Desember	93	91	184	50	1	54	52	2	132	435	292
Total			1050		1002			1007			5239	3652

Export Excel

REKAPITULASI PERKARA PIDANA ANAK
PENGADILAN NEGERI KETAPANG
Januari - Desember 2022

NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI	MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS	BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MINUTASI BULAN INI	PUTUS BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA	JUMLAH TERDAKWA	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	1	3	4	3	0	3	1	2	3	6	4
2	Februari	3	1	4	1	0	3	3	0	1	5	4
3	Maret	1	3	4	2	0	2	2	0	2	6	4
4	April	2	2	4	4	0	4	4	0	0	8	4
5	Mei	0	3	3	2	0	2	1	1	2	5	3
6	Juni	2	3	5	4	0	5	4	1	1	10	5
7	Juli	1	0	1	0	0	1	1	0	0	2	1
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	5	5	4	0	4	3	1	2	8	5
10	Oktober	2	0	2	1	0	2	2	0	0	3	2
11	November	0	3	3	2	0	2	1	1	2	4	3
12	Desember	2	4	6	5	0	6	6	0	0	8	5
Total			27		28			28			65	40

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\frac{1035}{1030} \times 100 = 100,49 \%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 terealisasi sebesar 100,49% dan mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 95% dengan persentase capaian sebesar **105,78%**.

c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Export Excel

REKAPITULASI UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI KETAPANG
Januari Desember 2022

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Permohonan Banding	4	3	4	8	6	5	2	5	7	5	3	6	58
2	Pengiriman Berkas	9	3	5	4	6	9	1	6	3	7	5	5	63
3	Putusan PT	13	7	4	4	2	8	9	1	6	3	8	4	69
4	Belum Putus PT	17	13	13	17	21	18	11	15	16	18	13	15	15
5	Penerimaan PN	15	5	5	4	0	8	7	1	1	5	10	5	66
6	Pemberitahuan Pemanding/Terbanding	18	6	5	5	0	8	9	1	2	5	9	5	73

Export Excel

REKAPITULASI UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PIDANA ANAK
PENGADILAN NEGERI KETAPANG
Januari Desember 2022

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Permohonan Banding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
2	Pengiriman Berkas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
3	Putusan PT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
4	Belum Putus PT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
5	Penerimaan PN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
6	Pemberitahuan Pemanding/Terbanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2

Export Excel

REKAPITULASI UPAYA HUKUM BANDING PERKARA GUGATAN
PENGADILAN NEGERI KETAPANG
Januari Desember 2022

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Permohonan Banding	1	0	2	1	0	2	1	0	0	0	1	2	10
2	Pengiriman Berkas	1	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	1	7
3	Putusan PT	2	0	1	0	2	0	0	1	2	0	0	0	8
4	Belum Putus PT	4	4	5	6	4	6	7	6	4	4	5	7	7
5	Penerimaan PN	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	5
6	Pemberitahuan Pemanding/Terbanding	1	0	1	1	1	1	0	1	0	2	0	0	8

Export Excel

REKAPITULASI PERKARA GUGATAN
PENGADILAN NEGERI KETAPANG
Januari - Desember 2022

NO	BULAN	SISA BULAN LALU			MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS BULAN INI	BELUM PEMBAGIAN MAJELIS	MEDIASI BERHASIL	MEDIASI GAGAL	GUGUR	CABUT	JUMLAH PUTUS	JUMLAH MEDIASI BERHASIL	MINUTASI BULAN INI	BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA
		BELUM PUTUS	SUDAH PUTUS BELUM MINUTASI	MEDIASI BERHASIL BELUM MINUTASI													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Januari	10	1	0	7	18	3	1	0	2	0	0	4	0	3	1	15
2	Februari	14	1	0	3	18	4	1	0	0	0	1	5	0	1	4	16
3	Maret	13	4	0	0	17	5	0	0	1	0	0	9	0	9	0	8
4	April	8	0	0	7	15	3	0	0	2	0	0	3	0	3	0	12
5	Mei	12	0	0	3	15	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	15
6	Juni	14	1	0	2	17	7	0	0	1	0	0	8	0	6	2	11
7	Juli	9	2	0	5	16	5	0	0	2	0	0	7	0	7	0	9
8	Agustus	9	0	0	3	12	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	11
9	September	11	0	0	5	16	1	0	0	6	0	1	1	0	1	0	14
10	Oktober	15	0	0	4	19	3	0	0	1	0	0	3	0	3	0	16
11	November	16	0	0	1	17	3	0	0	3	0	0	3	0	3	0	14
12	Desember	14	0	0	3	17	8	0	0	0	0	0	8	0	8	0	9
TOTAL					43		44		0	20	0	2			45		

Export Excel

REKAPITULASI PERKARA PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI KETAPANG
Januari - Desember 2022

NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI	MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS	BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MINUTASI BULAN INI	PUTUS BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA	JUMLAH TERDAKWA	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	89	59	148	39	3	46	36	10	112	367	278
2	Februari	112	35	147	35	1	45	18	27	129	347	270
3	Maret	129	57	186	61	1	88	72	16	114	413	330
4	April	114	75	189	51	1	67	61	6	128	365	300
5	Mei	128	42	170	59	0	65	33	32	137	325	266
6	Juni	137	72	209	60	1	92	78	14	131	401	332
7	Juli	131	42	173	69	2	83	76	7	97	348	280
8	Agustus	97	53	150	53	3	60	46	14	104	330	259
9	September	104	34	138	48	3	62	56	6	82	302	232
10	Oktober	82	25	107	42	6	48	46	2	61	216	165
11	November	61	57	118	27	1	29	25	4	93	285	208
12	Desember	93	78	171	37	1	41	39	2	132	413	279
Total			629		581			586			4112	3199

Jumlah Upaya Hukum Banding = 58 + 2 + 10 = 70

Jumlah Perkara yang Di selesaikan = 44 + 581 = 625

Jumlah yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum = 625 - 70 = 555

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\frac{555}{625} \times 100 = 88,8 \%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2022 terealisasi sebesar 88,8% dan mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 85% dengan persentase capaian sebesar **104,47%**.

d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Export Excel

REKAPITULASI UPAYA HUKUM KASASI PERKARA PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI KETAPANG
Januari Desember 2022

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Permohonan Kasasi	9	7	4	4	1	4	5	1	1	4	1	5	46
2	Pengiriman Berkas	4	5	11	4	2	2	3	6	0	2	3	4	46
3	Putusan MA	6	5	3	10	6	10	11	12	5	5	8	3	84
4	Belum Putus MA	66	68	69	63	58	52	46	35	31	30	23	25	25
5	Penerimaan PN	8	4	13	5	6	10	11	13	8	8	10	6	102
6	Pemberitahuan Pemohon/Termohon	13	4	10	3	3	10	6	16	3	14	7	8	97

Export Excel

REKAPITULASI UPAYA HUKUM KASASI PERKARA GUGATAN
PENGADILAN NEGERI KETAPANG
Januari Desember 2022

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Permohonan Kasasi	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3
2	Pengiriman Berkas	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3
3	Putusan MA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3
4	Belum Putus MA	9	10	10	10	9	10	10	11	11	10	10	10	10
5	Penerimaan PN	4	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	7
6	Pemberitahuan Pemohon/Termohon	1	3	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	6

Export Excel

REKAPITULASI PERKARA GUGATAN
PENGADILAN NEGERI KETAPANG
Januari - Desember 2022

NO	BULAN	SISA BULAN LALU			MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS BULAN INI	BELUM PEMBAGIAN MAJELIS	MEDIASI BERHASIL	MEDIASI GAGAL	GUGUR	CABUT	JUMLAH PUTUS	JUMLAH MEDIASI BERHASIL	MINUTASI BULAN INI	BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA
		BELUM PUTUS	SUDAH PUTUS BELUM MINUTASI	MEDIASI BERHASIL BELUM MINUTASI													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Januari	10	1	0	7	18	3	1	0	2	0	0	4	0	3	1	15
2	Februari	14	1	0	3	18	4	1	0	0	0	1	5	0	1	4	16
3	Maret	13	4	0	0	17	5	0	0	1	0	0	9	0	9	0	8
4	April	8	0	0	7	15	3	0	0	2	0	0	3	0	3	0	12
5	Mei	12	0	0	3	15	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	15
6	Juni	14	1	0	2	17	7	0	0	1	0	0	8	0	6	2	11
7	Juli	9	2	0	5	16	5	0	0	2	0	0	7	0	7	0	9
8	Agustus	9	0	0	3	12	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	11
9	September	11	0	0	5	16	1	0	0	6	0	1	1	0	1	0	14
10	Oktober	15	0	0	4	19	3	0	0	1	0	0	3	0	3	0	16
11	November	16	0	0	1	17	3	0	0	3	0	0	3	0	3	0	14
12	Desember	14	0	0	3	17	8	0	0	0	0	0	8	0	8	0	9
TOTAL					43		44		0	20	0	2			45		9

Export Excel

REKAPITULASI PERKARA PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI KETAPANG
Januari - Desember 2022

NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI	MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS	BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MINUTASI BULAN INI	PUTUS BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA	JUMLAH TERDAKWA	JUMLAH TERPIDANA
1	Januari	89	59	148	39	3	46	36	10	112	367	278
2	Februari	112	35	147	35	1	45	18	27	129	347	270
3	Maret	129	57	186	61	1	88	72	16	114	413	330
4	April	114	75	189	51	1	67	61	6	128	365	300
5	Mei	128	42	170	59	0	65	33	32	137	325	266
6	Juni	137	72	209	60	1	92	78	14	131	401	332
7	Juli	131	42	173	69	2	83	76	7	97	348	280
8	Agustus	97	53	150	53	3	60	46	14	104	330	259
9	September	104	34	138	48	3	62	56	6	82	302	232
10	Oktober	82	25	107	42	6	48	46	2	61	216	165
11	November	61	57	118	27	1	29	25	4	93	285	208
12	Desember	93	78	171	37	1	41	39	2	132	413	279
Total			629		581			586			4112	3199

Jumlah Upaya Hukum Kasasi = 46 + 3 = 49

Jumlah Perkara yang Diselesaikan = 44 + 581 = 625

Jumlah yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi = 625 - 49 = 576

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\frac{576}{625} \times 100 = 92,16 \%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2022 terealisasi sebesar 92,16% dan mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 85% dengan persentase capaian sebesar **108,42%**.

e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Export Excel

REKAPITULASI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA GUGATAN
PENGADILAN NEGERI KETAPANG
Januari Desember 2022

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Permohonan Peninjauan Kembali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pengiriman Berkas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Putusan MA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Belum Putus MA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Penerimaan PN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Pemberitahuan Pemohon/Termohon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Export Excel

REKAPITULASI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI KETAPANG
Januari Desember 2022

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Permohonan Peninjauan Kembali	1	0	0	1	1	1	0	1	2	1	2	0	10
2	Pengiriman Berkas	1	0	1	1	0	2	0	0	1	2	0	3	11
3	Putusan MA	0	0	2	3	2	1	1	1	2	0	0	2	14
4	Belum Putus MA	11	11	9	7	6	6	5	5	5	6	8	6	6
5	Penerimaan PN	0	0	1	0	0	4	0	1	3	1	2	1	13
6	Pemberitahuan Pemohon/Termohon	0	0	0	0	1	3	0	1	0	3	1	0	9

Export Excel

REKAPITULASI PERKARA GUGATAN
PENGADILAN NEGERI KETAPANG
Januari - Desember 2022

NO	BULAN	SISA BULAN LALU			MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS BULAN INI	BELUM PEMBAGIAN MAJELIS	MEDIASI BERHASIL	MEDIASI GAGAL	GUGUR	CABUT	JUMLAH PUTUS	JUMLAH MEDIASI BERHASIL	MINUTASI BULAN INI	BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA
		BELUM PUTUS	SUDAH PUTUS BELUM MINUTASI	MEDIASI BERHASIL BELUM MINUTASI													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Januari	10	1	0	7	18	3	1	0	2	0	0	4	0	3	1	15
2	Februari	14	1	0	3	18	4	1	0	0	0	1	5	0	1	4	16
3	Maret	13	4	0	0	17	5	0	0	1	0	0	9	0	9	0	8
4	April	8	0	0	7	15	3	0	0	2	0	0	3	0	3	0	12
5	Mei	12	0	0	3	15	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	15
6	Juni	14	1	0	2	17	7	0	0	1	0	0	8	0	6	2	11
7	Juli	9	2	0	5	16	5	0	0	2	0	0	7	0	7	0	9
8	Agustus	9	0	0	3	12	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	11
9	September	11	0	0	5	16	1	0	0	6	0	1	1	0	1	0	14
10	Oktober	15	0	0	4	19	3	0	0	1	0	0	3	0	3	0	16
11	November	16	0	0	1	17	3	0	0	3	0	0	3	0	3	0	14
12	Desember	14	0	0	3	17	8	0	0	0	0	0	8	0	8	0	9
TOTAL					43		44		0	20	0	2			45		9

Export Excel

REKAPITULASI PERKARA PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI KETAPANG
Januari - Desember 2022

NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI	MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS	BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MINUTASI BULAN INI	PUTUS BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA	JUMLAH TERDAKWA	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	89	59	148	39	3	46	36	10	112	367	278
2	Februari	112	35	147	35	1	45	18	27	129	347	270
3	Maret	129	57	186	61	1	88	72	16	114	413	330
4	April	114	75	189	51	1	67	61	6	128	365	300
5	Mei	128	42	170	59	0	65	33	32	137	325	266
6	Juni	137	72	209	60	1	92	78	14	131	401	332
7	Juli	131	42	173	69	2	83	76	7	97	348	280
8	Agustus	97	53	150	53	3	60	46	14	104	330	259
9	September	104	34	138	48	3	62	56	6	82	302	232
10	Oktober	82	25	107	42	6	48	46	2	61	216	165
11	November	61	57	118	27	1	29	25	4	93	285	208
12	Desember	93	78	171	37	1	41	39	2	132	413	279
Total			629		581			586			4112	3199

Jumlah Upaya Hukum Kasasi = 0 + 10 = 10

Jumlah Perkara yang Diselesaikan = 44 + 581 = 625

Jumlah yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum = 625 - 10 = 615

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100 = 98,4 \%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2022 terealisasi sebesar 98,4% dan mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 85% dengan persentase capaian sebesar 115,76%.

f. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

No Urut	No Diversi	Tanggal diterima Permohonan	Nama Pemohon	a. Nomor Register Penyidik b. Nomor Register PJ c. Nomor Perkara PN	Anak	Tanggal Kesepakatan	Tanggal Pelaksanaan Diversi	Template Kesepakatan Diversi	Link
1	1/Pen.Div/2019/PN Ktp Jo5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ktp	08 Apr. 2019	Hakim:	5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ktp	1. ANDI DARTO APING bin ASUN aim	12 Apr. 2019	28 Jan. 2020	Selesai	[detail]
2	8/Pen.Div/2018/PN Ktp	03 Apr. 2018	Penuntut Umum:	8/476/Q.1.13/Euh.2/03/2018	10. BENDI SATHIA alias BENDI bin SOPHAN	22 Mar. 2018	03 Apr. 2018	Cetak	[detail]
3	7/Pen.Div/2018/PN Ktp	29 Mar. 2018	Penyidik: ANDRY SIMANJUNTAK	8/172/III/2018/Reskrim	9. PETRUS KIMIN alias KIMIN anak laki laki dari ADITYAKO	01 Feb. 2018	29 Mar. 2018	Cetak	[detail]
4	5/Pen.Div/2018/PN Ktp	14 Mar. 2018	Penyidik: SULASMI	8/151/II/2018/Reskrim	5. IVAN LESSMANA alias IVAN bin HERMAN	29 Jan. 2018	12 Mar. 2018	Cetak	[detail]
5	6/Pen.Div/2018/PN Ktp	14 Mar. 2018	Penyidik: BAMBANG PRIHONO R	8/21/III/2018/Reskrim-PPA	6. HENCKI RONALDI bin YUSUF 7. PERI WAHYUDI bin MURYADI 8. MUHAMMAD SYARIANTO bin SAIRIN	30 Jan. 2018	14 Mar. 2018	Cetak	[detail]
6	4/Pen.Div/2018/PN Ktp	20 Feb. 2018	Penyidik: IRWAN ZAHEDI	8/09/II/2018/Reskrim	4. PETRUS RINDI anak dari MARKUS SEMBILAN	12 Feb. 2018	20 Feb. 2018	Selesai	[detail]
7	3/Pen.Div/2018/PN Ktp	12 Feb. 2018	Penyidik: ANDRY SIMANJUNTAK	8/71/II/2018/Reskrim-I	3. ANDI bin KISUT aim	15 Des. 2017	12 Feb. 2018	Cetak	[detail]
8	2/Pen.Div/2018/PN Ktp	01 Feb. 2018	Penyidik: ARI SUDANA	8/46/II/2018/Reskrim	2. RIDWAN SETIAWAN alias ERIK bin SYAHRAN ABDULLAH	30 Jan. 2018	01 Feb. 2018	Cetak	[detail]
9	1/Pen.Div/2018/PN Ktp	12 Jan. 2018	Penyidik: ARSYAMUDIN	8/157/XII/2017/Lantas	1. AKWILLA YOLANDA	19 Des. 2017	12 Jan. 2018	Cetak	[detail]

Pada Tahun 2022 Tidak ada yang mengajukan permohonan Diversi, sehingga realisasinya 0.

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100 = - \%$$

$$\frac{0}{0}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, persentase perkara Diversi yang dinyatakan berhasil pada tahun 2022 terealisasi sebesar - % dan mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 5% dengan persentase capaian sebesar - %.

g. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Nilai IKM Tahun 2022			
TW I	TW II	TW III	TW IV
93,44	96,10	95,36	86,74
<i>Nilai rata-rata IKM Tahun 2022</i>			92,91

Penilaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Ketapang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali/pertriwulan melalui aplikasi siSUPER Badilum Mahkamah Agung, dan telah dilaksanakan dengan hasil seperti pada tabel diatas.

Rumus :

$$\frac{\text{Index persepsi Kepuasan Pencari Keadilan}}{100\%} \times 100 = \frac{93,44 + 96,10 + 95,36 + 86,74}{4 \text{ (Triwulan I - IV)}} \times 100 = 92,91 \%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 terealisasi sebesar 92,91% dan mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 80% dengan persentase capaian sebesar **116,14%**.

2. Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Efektivitas Penelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang	100	100	100

dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu			
b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	1	1,72	172
Capaian Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	124,00		

Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Ketapang terus berupaya mencapai target dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang efektif dan efisiensi, dan terbukti pada capaian sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun ini dengan nilai capaian **124,00%**

a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Export Excel

REKAPITULASI PERKARA GUGATAN
PENGADILAN NEGERI KETAPANG
Januari - Desember 2022

NO	BULAN	SISA BULAN LALU			MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS BULAN INI	BELUM PEMBAGIAN MAJELIS	MEDIASI BERHASIL	MEDIASI GAGAL	GUGUR	CABUT	JUMLAH PUTUS	JUMLAH MEDIASI BERHASIL	MINUTASI BULAN INI	BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA
		BELUM PUTUS	SUDAH PUTUS BELUM MINUTASI	MEDIASI BERHASIL BELUM MINUTASI													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Januari	11	1	0	10	22	6	1	0	2	0	0	7	0	6	1	16
2	Februari	15	1	0	6	22	5	1	0	0	0	1	6	0	2	4	19
3	Maret	16	4	0	2	22	8	0	0	1	0	0	12	0	12	0	10
4	April	10	0	0	8	18	6	0	0	2	0	0	6	0	5	1	13
5	Mei	12	1	0	33	46	1	6	0	1	0	0	2	0	1	1	45
6	Juni	44	1	0	7	52	40	6	0	1	0	0	41	0	38	3	14
7	Juli	11	3	0	6	20	8	6	0	2	0	0	11	0	11	0	9
8	Agustus	9	0	0	22	31	17	6	0	1	0	0	17	0	17	0	14
9	September	14	0	0	24	38	20	6	0	6	0	1	20	0	11	9	26
10	Oktober	18	9	0	14	41	6	9	0	1	0	0	15	0	15	0	26
11	November	26	0	0	23	49	31	9	0	3	0	0	31	0	15	16	34
12	Desember	18	16	0	6	40	15	9	0	0	0	0	31	0	31	0	9
TOTAL					161		163		0	20	0	2			164		

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} = 100\%$$

$$\frac{164}{163} \times 100 = 100,61 \%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu pada tahun 2022 terealisasi sebesar 100,61% dan mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar **100,61%**.

b. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Export Excel

REKAPITULASI PERKARA PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI KETAPANG
Januari - Desember 2022

NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI	MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS	BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MINUTASI BULAN INI	PUTUS BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA	JUMLAH TERDAKWA	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	89	91	180	71	3	78	68	10	112	441	314
2	Februari	112	102	214	102	1	112	85	27	129	543	344
3	Maret	129	79	208	83	1	110	94	16	114	468	358
4	April	114	122	236	98	1	114	108	6	128	498	349
5	Mei	128	58	186	75	0	81	49	32	137	366	282
6	Juni	137	77	214	65	1	97	83	14	131	408	338
7	Juli	131	76	207	103	2	117	110	7	97	449	315
8	Agustus	97	146	243	146	3	153	139	14	104	589	354
9	September	104	93	197	107	3	121	115	6	82	459	293
10	Oktober	82	52	134	69	6	75	73	2	61	290	197
11	November	61	63	124	33	1	35	31	4	93	293	216
12	Desember	93	91	184	50	1	54	52	2	132	435	292
	Total		1050		1002			1007			5239	3652

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Pidana}} \times 100\%$$

$$\frac{1007}{1002} \times 100 = 100,49 \%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, persentase perkara Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2022 terealisasi sebesar 100,49% dan mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar **100,49 %**.

c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

JUMLAH PERKARA MEDIASI DAN HASIL MEDIASI
PENGADILAN NEGERI KETAPANG
Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah Perkara			Jumlah Perkara Mediasi				Jumlah Hasil Mediasi dan % Hasil Mediasi Terhadap Jumlah Perkara Mediasi											Mediasi Berjalan		
		Sisa Bulan Lalu	Bulan Berjalan	Total	Sisa Bulan Lalu	Bulan Berjalan	Total	%	Berhasil			Total Berhasil		Tidak Berhasil		Tidak Dapat Dilaksanakan						
									Akta Perdamaian / Putusan		Berhasil Sebagian	Pencabutan		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah		%										
1	Januari	10	7	17	39	-	39	229%	-	-	1	3%	-	-	1	3%	1	3%	-	-	37	95%
2	Februari	14	3	17	37	-	37	218%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	100%
3	Maret	13	-	13	37	2	39	300%	-	-	-	-	-	-	-	1	3%	-	-	-	38	97%
4	April	8	7	15	38	1	39	240%	-	-	-	-	-	-	-	2	5%	-	-	-	37	95%
5	Mei	12	3	15	37	2	39	240%	-	-	-	-	-	-	-	1	3%	-	-	-	38	97%
6	Juni	14	2	16	38	1	39	244%	-	-	-	-	-	-	-	1	3%	-	-	-	38	97%
7	Juli	9	5	14	38	2	40	284%	-	-	-	-	-	-	-	2	5%	-	-	-	38	95%
8	Agustus	9	3	12	38	3	41	342%	-	-	-	-	-	-	-	1	2%	-	-	-	40	98%
9	September	11	5	16	40	3	43	269%	-	-	-	-	-	-	-	6	14%	-	-	-	37	86%
10	Oktober	15	4	19	37	3	40	211%	-	-	-	-	-	-	-	1	2%	-	-	-	39	98%
11	November	16	1	17	39	1	40	235%	-	-	-	-	-	-	-	3	8%	-	-	-	37	92%
12	Desember	14	3	17	37	1	38	224%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	100%
	Total	10	43	53	39	19	58	109%	-	-	1	2%	-	-	1	2%	19	33%	-	-	38	66%

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

$$\frac{1}{58} \times 100 = 1,72\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi pada tahun 2022 terealisasi sebesar 1,72% dan mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 1% dengan persentase capaian sebesar **172%**.

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100

Capaian Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

100

Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Ketapang terus berupaya mencapai target dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang efektif dan efisiensi, dan terbukti pada capaian sasaran ***Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan*** Tahun 2022 dengan nilai **100%**

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} = 100\%$$

$$\frac{312}{312} \times 100 = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2022 terealisasi sebesar 100% dan mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100% dengan persentase Capaian sebesar **100%**.

4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	30	50	166,67
Capaian Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan		166,67	

Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Ketapang terus berupaya mencapai target dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang efektif dan efisiensi, dan terbukti pada capaian sasaran ***Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan*** Tahun 2022 dengan nilai **166,67%**

16					
17	B	2022			
18	1	Perdata Gugatan Tingkat Pertama (termasuk PHI dan Niaga)	10	43	44
19	2	Perdata Gugatan Sederhana Tingkat Pertama	0	2	2
20	3	Perdata Permohonan Tingkat Pertama	1	39	40
21	4	Perdata Permohonan konsinyasi Tingkat Pertama	0	79	79
22	5	Eksekusi	5	1	3
23	6	Perdata Tingkat Banding	2	10	9
24	7	Perdata Tingkat Kasasi	11	3	7
25	8	Perdata Tingkat Peninjauan Kembali	0	0	0
26					

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$$

$$\frac{3}{6} \times 100 = 50\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) pada tahun 2022 terealisasi sebesar 50% dan mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 30% dengan persentase Capaian sebesar **166,67%**.

C. REALISASI ANGGARAN

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas Pengadilan Negeri Ketapang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp4.875.684.000 untuk DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dengan persentase penyerapan sebesar **98,07%** dan alokasi anggaran DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar Rp100.800.000 dengan persentase penyerapan sebesar **98,51%**.

Berikut perincian anggaran beserta realisasinya sampai bulan 31 Desember 2022:

No	Program	Alokasi	Realisasi	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.	Rp4.756.684.000	Rp4.718.794.075	98,07%
	<i>Belanja Pegawai</i>	Rp3.570.855.000	Rp3.529.685.508	98,85%
	<i>Belanja Barang Operasional</i>	Rp1.185.829.000	Rp1.133.108.567	95,55%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.	Rp119.000.000	Rp119.000.000	100,00%

3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.	Rp100.800.000	Rp99.300.000	98,51%
---	--	----------------------	---------------------	---------------

Alasan mengapa realisasi Anggaran Tahun 2022 tidak 100% adalah terdapat beberapa anggaran yang tidak dapat dialihkan ke rekening belanja yang lain, seperti anggaran untuk penanggulangan covid-19. Selain itu kendala lain adalah karena anggaran yang sudah ada tidak dapat di revisi sehingga tidak dapat terealisasi 100%.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PN Ketapang Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi kinerja Lembaga Peradilan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. LKjIP PN Ketapang Tahun 2022 ini disusun oleh PN Ketapang, untuk melaporkan suatu bentuk pencapaian kinerja (*performance result*) selama kurun waktu tahun 2022 yang diperbandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*) PN Ketapang tahun 2022.

Kinerja PN Ketapang Tahun 2022 berdasarkan pencapaian kinerja (*performance result*) diperbandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*) selama kurun waktu tahun 2022 dapat disimpulkan secara umum telah mencapai sasaran yang diharapkan, meskipun ada beberapa sasaran yang tidak memenuhi target yang diharapkan.

Penganalisaan capaian kinerja PN Ketapang tahun 2022 adalah upaya dan merupakan suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja dan motivasi kearah perbaikan PN Ketapang sebagai Institusi Pengadilan Tingkat Pertama yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

LKjIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa yang akan datang.

B. Saran-saran

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan untuk menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Pontianak sehubungan dengan ditetapkannya Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Pengadilan berpredikat Akreditasi A “Excellent” dan Pengadilan dengan Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) maka untuk meningkatkan dan mempertahankan prestasi yang telah dicapai Pengadilan Negeri Pontianak tersebut diperlukan :

1. Sangat dibutuhkan penambahan sumber daya manusia sesuai dengan formasi yang dibutuhkan baik CPNS dan honorer.
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana seperti alat kantor modern dan sarana prasarana demi menunjang pelayanan publik yang prima.
3. Pelatihan dan sosialisasi kepada pegawai untuk pemantapan skill dibidang administrasi perkara berbasis teknologi.

4. Pelatihan teknis bagi seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Pontianak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan kualitas produk – produk yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri Ketapang.
5. Penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan pengadilan dengan kelulusan akreditasi yang sempurna.
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, dengan SDM proposional, berintegritas dan handal diharapkan kualitas dan mutu kerja dapat tercapai dengan baik

PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II

CAKEP

Cepat, Akurat, Kreatif, Efektif dan Profesional